

Arsyil Waritsman, S.Pd., M.Pd.
Dr. Uswatun Khasanah M.Pd.I.



SEKOLAH DI UJUNG NUSANTARA:

**STRATEGI ADMINISTRASI PENDIDIKAN
DI WILAYAH KEPULAUAN**



SEKOLAH DI UJUNG NUSANTARA:
STRATEGI ADMINISTRASI PENDIDIKAN
DI WILAYAH KEPULAUAN

Arsyil Waritsman, S.Pd., M.Pd.
Dr. Uswatun Khasanah, M.Pd.I.



TAHTA MEDIA GROUP

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

**SEKOLAH DI UJUNG NUSANTARA:
STRATEGI ADMINISTRASI PENDIDIKAN
DI WILAYAH KEPULAUAN**

Penulis:

Arsyil Waritsman, S.Pd., M.Pd.

Dr. Uswatun Khasanah, M.Pd.I.

Desain Cover:

Tahta Media

Editor:

Tahta Media

Proofreader:

Tahta Media

Ukuran:

vii, 79, Uk: 15,5 x 23 cm

ISBN: 978-634-262-251-3

Cetakan Pertama:

Juli 2026

Hak Cipta 2026, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2026 by Tahta Media Group

All Right Reserved

PENERBIT TAHTA MEDIA GROUP

Perumahan Mitra Utama Residence 3 Blok A no 1, Sawahan, Tempel,

Kec. Gatak, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57557

email: tahtaliterasimedia@gmail.com

website: <http://store.tahtamedia.co.id/>

Anggota IKAPI (216/JTE/2021)

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku berjudul “Sekolah di Ujung Nusantara: Strategi Administrasi Pendidikan di Wilayah Kepulauan” dapat diselesaikan. Buku ini disusun sebagai upaya untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dan mendalam terkait penyelenggaraan pendidikan di wilayah kepulauan dengan karakteristik geografis, sosial, ekonomi, dan budaya yang berbeda dengan daerah perkotaan maupun wilayah daratan. Kondisi tersebut menghadirkan tantangan tersendiri dalam pengelolaan pendidikan, sehingga diperlukan pendekatan administrasi yang adaptif, inovatif, dan berorientasi pada pemerataan layanan pendidikan.

Wilayah kepulauan adalah bagian penting dari identitas bangsa Indonesia sebagai sebuah negara maritim. Namun demikian, beragam keterbatasan infrastruktur, akses transportasi, distribusi tenaga pendidik, sarana pembelajaran, serta dukungan teknologi masih menjadi persoalan yang memengaruhi kualitas layanan pendidikan di banyak daerah kepulauan. Oleh karena itu, administrasi pendidikan tidak hanya dipahami sebagai aktivitas pengelolaan sekolah semata, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk memastikan bahwa setiap peserta didik memperoleh hak pendidikan yang setara tanpa memandang lokasi geografisnya.

Buku ini terdiri atas beberapa komponen utama yang saling berkaitan. Bagian pertama membahas realitas dan tantangan pendidikan di wilayah kepulauan sebagai landasan untuk memahami berbagai persoalan yang dihadapi sekolah-sekolah di daerah kepulauan. Bagian kedua menguraikan konsep dan prinsip administrasi pendidikan di daerah kepulauan yang dapat menjadi pedoman dalam pengelolaan lembaga pendidikan. Selanjutnya,

bagian ketiga menyajikan berbagai strategi administrasi pendidikan di sekolah kepulauan yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sekolah, pengembangan sumber daya manusia, serta mutu layanan pendidikan. Pada bagian akhir, buku ini menawarkan rekomendasi kebijakan yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah, pemangku kepentingan pendidikan, dan pengelola sekolah dalam memperkuat tata kelola pendidikan di wilayah kepulauan.

Penyusunan buku ini didasarkan pada berbagai kajian teoritis, hasil penelitian, serta praktik-praktik pendidikan yang berkembang di daerah kepulauan. Dengan demikian, buku ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi akademisi, mahasiswa, peneliti, guru, kepala sekolah, pengawas, serta para pengambil kebijakan yang memiliki perhatian terhadap pengembangan pendidikan di wilayah terdepan, terluar, dan terpencil. Selain itu, buku ini juga diharapkan dapat memperkaya diskursus mengenai pentingnya administrasi pendidikan yang kontekstual dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat kepulauan.

Akhirnya, semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu administrasi pendidikan serta menjadi salah satu kontribusi dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu, inklusif, dan berkeadilan bagi seluruh anak bangsa hingga ke ujung Nusantara.

Indonesia, 14 Juni 2026

Tim Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB 2 PENDIDIKAN DI WILAYAH KEPULAUAN: REALITAS DAN TANTANGAN	7
A. Karakteristik Wilayah Kepulauan di Indonesia	8
B. Akses Pendidikan di Daerah Terpencil dan Terluar	15
C. Kesenjangan Infrastruktur Pendidikan	17
D. Dukungan teknologi pendidikan	19
E. Kondisi Guru dan Tenaga Kependidikan di Wilayah Kepulauan.....	21
F. Tantangan Administrasi Pendidikan di Sekolah Kepulauan..	23
BAB 3 KONSEP DAN PRINSIP ADMINISTRASI PENDIDIKAN DI DAERAH TERPENCIL.....	26
A. Pengertian dan Ruang Lingkup Administrasi Pendidikan.....	27
B. Manajemen Berbasis Sekolah di Daerah Kepulauan	46
C. Kepemimpinan Kepala Sekolah di Wilayah Kepulauan.....	48
D. Peran Komunitas dan Pemerintah Lokal dalam Administrasi Pendidikan.....	50
BAB 4 STRATEGI ADMINISTRASI PENDIDIKAN DI SEKOLAH KEPULAUAN	52
A. Strategi Perencanaan Program Sekolah.....	53
B. Pengelolaan Guru dan Tenaga Kependidikan.....	55
C. Administrasi Sarana dan Prasarana di Daerah Kepulauan....	57
D. Pengelolaan Keuangan Sekolah di Wilayah Kepulauan	59
E. Pemanfaatan Teknologi untuk Administrasi dan Pembelajaran	61
F. Kolaborasi Sekolah dengan Masyarakat Kepulauan	62

BAB 5 REKOMENDASI KEBIJAKAN SEKOLAH DI UJUNG NUSANTARA	65
A. Rekomendasi Kebijakan Pendidikan Wilayah Kepulauan	66
B. Masa Depan Pendidikan di Ujung Nusantara.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....	72
PROFIL PENULIS.....	78

BAB I

PENDAHULUAN



Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki ribuan pulau yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Kondisi geografis ini menjadikan penyelenggaraan berbagai layanan publik menghadapi tantangan yang sangat beragam, termasuk dalam bidang pendidikan. Di satu sisi, keberagaman wilayah tersebut merupakan kekayaan nasional yang luar biasa. Namun di sisi lain, perbedaan akses, sarana, dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat di setiap pulau sering kali menciptakan kesenjangan dalam pelayanan pendidikan.

Pendidikan pada hakikatnya merupakan hak dasar setiap warga negara yang harus dijamin keberlangsungannya oleh negara (Ristovska, 2021; Singh, 2010). Dalam konteks wilayah kepulauan, pemenuhan hak pendidikan sering kali menghadapi kendala geografis, transportasi, dan keterbatasan sumber daya. Banyak sekolah berdiri di pulau-pulau kecil dengan jumlah penduduk yang tidak terlalu besar serta akses yang terbatas ke pusat pemerintahan. Situasi ini menuntut adanya pendekatan khusus dalam pengelolaan dan administrasi pendidikan agar layanan pendidikan tetap berjalan secara efektif.

Kondisi sekolah di wilayah kepulauan sering kali berbeda dengan sekolah yang berada di daerah perkotaan atau wilayah daratan utama. Keterbatasan sarana prasarana, dan kekurangan tenaga pendidik, serta sulitnya distribusi bahan ajar merupakan persoalan yang kerap dihadapi. Selain itu, faktor cuaca dan kondisi laut juga dapat memengaruhi mobilitas guru maupun peserta didik. Oleh karena itu, pengelolaan sekolah di wilayah ini memerlukan strategi yang lebih adaptif dan kontekstual.

Di tengah berbagai keterbatasan tersebut, sekolah di wilayah kepulauan tetap menjadi harapan utama masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup generasi muda. Sekolah bukan hanya

tempat belajar membaca dan menulis, tetapi juga ruang pembentukan karakter, keterampilan hidup, serta identitas kebangsaan. Kehadiran sekolah sering kali menjadi pusat aktivitas sosial dan budaya masyarakat setempat. Dengan demikian, keberlangsungan pendidikan di daerah kepulauan memiliki arti yang sangat strategis bagi pembangunan manusia.

Dalam konteks inilah administrasi pendidikan memegang peran yang sangat penting. Administrasi pendidikan tidak hanya berkaitan dengan kegiatan pencatatan atau pengelolaan dokumen sekolah. Lebih dari itu, administrasi pendidikan merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan seluruh kegiatan pendidikan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal (Fatimah & Ilyas, 2024). Di wilayah kepulauan, fungsi administrasi pendidikan harus mampu menjawab tantangan keterbatasan dan kompleksitas kondisi lapangan.

Pengelolaan pendidikan di daerah kepulauan membutuhkan pendekatan yang berbeda dari praktik administrasi pendidikan yang umum diterapkan di wilayah perkotaan. Para kepala sekolah, guru, dan pengelola pendidikan harus memiliki kreativitas serta kemampuan beradaptasi dengan kondisi lokal. Mereka dituntut untuk mampu memanfaatkan sumber daya yang terbatas secara efektif dan efisien. Selain itu, mereka juga perlu membangun kolaborasi yang kuat dengan masyarakat dan pemerintah daerah.

Tantangan administrasi pendidikan di wilayah kepulauan tidak hanya berkaitan dengan faktor fisik atau geografis. Faktor sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat juga sangat memengaruhi keberhasilan penyelenggaraan pendidikan. Dalam beberapa kasus, anak-anak harus membantu orang tua mereka dalam kegiatan ekonomi keluarga sehingga waktu belajar menjadi terbatas. Kondisi

ini menuntut sekolah untuk merancang strategi pengelolaan yang lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, muncul peluang baru untuk mengatasi sebagian hambatan geografis dalam dunia pendidikan. Teknologi dapat membantu memperluas akses terhadap sumber belajar, meningkatkan komunikasi antar pendidik, dan memperkuat jaringan kerja sama antar sekolah. Namun demikian, penerapan teknologi di wilayah kepulauan juga menghadapi tantangan tersendiri seperti keterbatasan jaringan internet dan infrastruktur listrik. Oleh karena itu, strategi administrasi pendidikan diharapkan mampu mengintegrasikan teknologi secara realistis sesuai dengan kondisi wilayah.

Selain aspek teknologi, keberhasilan pendidikan di wilayah kepulauan juga sangat dipengaruhi oleh kualitas kepemimpinan sekolah. Kepala sekolah tidak hanya berperan sebagai administrator, melainkan juga sebagai pemimpin perubahan yang mampu menggerakkan seluruh warga sekolah. Kepemimpinan yang visioner, adaptif, dan kolaboratif menjadi kunci utama dalam menghadapi berbagai keterbatasan yang ada. Dengan kepemimpinan yang kuat, sekolah dapat berkembang meskipun berada di wilayah yang kepulauan.

Pentingnya penguatan administrasi pendidikan di wilayah kepulauan juga berkaitan dengan upaya pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia. Selama ini, kesenjangan antara pendidikan di wilayah perkotaan dan daerah terpencil masih menjadi isu yang terus dibicarakan. Jika tidak dikelola dengan baik, kesenjangan tersebut dapat berdampak pada ketidakmerataan kesempatan bagi generasi muda untuk berkembang. Oleh sebab itu, strategi administrasi pendidikan yang tepat menjadi salah satu langkah penting untuk memperkecil kesenjangan tersebut.

Buku ini hadir sebagai upaya untuk menggambarkan realitas pendidikan di wilayah kepulauan sekaligus menawarkan berbagai pendekatan strategis dalam pengelolaannya. Pengalaman lapangan, praktik baik, dan berbagai kajian administrasi pendidikan menjadi dasar dalam penyusunan gagasan yang disajikan dalam buku ini. Harapannya, buku ini dapat memberikan perspektif baru bagi para praktisi pendidikan yang bekerja di wilayah kepulauan. Selain itu, buku ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi para akademisi dan pengambil kebijakan pendidikan.

Pembahasan dalam buku ini disusun secara sistematis agar pembaca dapat memahami permasalahan pendidikan di wilayah kepulauan secara menyeluruh. Pada bagian awal, buku ini membahas realitas dan tantangan pendidikan di wilayah kepulauan yang menjadi latar belakang penting dalam memahami konteks pengelolaan sekolah. Selanjutnya, buku ini menguraikan konsep dan prinsip administrasi pendidikan yang relevan untuk diterapkan di daerah kepulauan. Dengan memahami dasar konseptual tersebut, pembaca diharapkan dapat melihat pentingnya pendekatan administrasi yang kontekstual.

Pada bagian berikutnya, buku ini memaparkan berbagai strategi administrasi pendidikan yang dapat diterapkan di sekolah-sekolah yang berada di wilayah kepulauan. Strategi tersebut mencakup pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan sarana prasarana, serta penguatan kemitraan dengan masyarakat. Pendekatan yang ditawarkan tidak bersifat kaku, melainkan fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah. Hal ini penting mengingat setiap wilayah kepulauan memiliki karakteristik yang berbeda.

Akhirnya, buku ini juga menawarkan model pengelolaan sekolah yang dapat menjadi inspirasi bagi sekolah-sekolah yang berada di

ujung Nusantara. Model ini dirancang dengan mempertimbangkan realitas lapangan serta prinsip-prinsip administrasi pendidikan yang efektif. Dengan adanya model pengelolaan yang kontekstual, diharapkan sekolah-sekolah di wilayah kepulauan dapat berkembang secara lebih mandiri dan berkelanjutan. Melalui upaya tersebut, pendidikan di ujung Nusantara dapat terus tumbuh sebagai fondasi bagi masa depan bangsa Indonesia.

BAB 2

PENDIDIKAN DI WILAYAH KEPULAUAN: REALITAS DAN TANTANGAN



Pendidikan di wilayah kepulauan menghadapi realitas yang berbeda dibandingkan dengan daerah daratan karena dipengaruhi oleh kondisi geografis, keterbatasan infrastruktur, serta akses transportasi yang tidak selalu memadai. Banyak sekolah berada di pulau-pulau kecil dengan jumlah penduduk yang terbatas, sehingga ketersediaan tenaga pendidik, fasilitas belajar, dan sumber daya pendidikan sering kali belum merata. Situasi ini menimbulkan berbagai tantangan, mulai dari kesulitan distribusi guru, keterbatasan sarana teknologi dan bahan ajar, hingga tingginya biaya operasional pendidikan. Oleh karena itu, pengembangan pendidikan di wilayah kepulauan memerlukan perhatian khusus melalui kebijakan yang adaptif, inovasi pembelajaran, serta dukungan infrastruktur yang mampu menjembatani keterbatasan geografis demi mewujudkan pemerataan dan kualitas pendidikan yang lebih baik.

A. KARAKTERISTIK WILAYAH KEPULAUAN DI INDONESIA

1. Kondisi geografis wilayah kepulauan

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, dengan ribuan pulau yang tersebar dari barat hingga timur. Kondisi geografis ini menjadi karakteristik utama yang membedakan Indonesia dari banyak negara lain. Wilayah yang terpisah oleh laut, jarak antar pulau yang jauh, serta beragam kondisi alam seperti pegunungan, hutan, dan daerah terpencil membuat akses antar wilayah tidak selalu mudah. Keadaan geografis tersebut tidak hanya memengaruhi aspek ekonomi dan sosial, tetapi juga memiliki dampak besar terhadap dunia pendidikan di Indonesia.

Dalam konteks pendidikan, kondisi geografis kepulauan sering kali menimbulkan tantangan dalam pemerataan akses

pendidikan. Banyak daerah terpencil atau pulau kecil yang sulit dijangkau oleh sarana transportasi yang memadai. Hal ini menyebabkan sebagian anak usia sekolah harus menempuh perjalanan yang jauh, bahkan menyeberangi laut, untuk mencapai sekolah. Akibatnya, tingkat partisipasi pendidikan di beberapa wilayah terpencil cenderung lebih rendah dibandingkan daerah perkotaan yang memiliki akses lebih mudah.

Selain itu, keterbatasan infrastruktur pendidikan juga menjadi masalah yang muncul akibat kondisi geografis tersebut. Di beberapa wilayah kepulauan, jumlah sekolah, ruang kelas, dan fasilitas belajar masih terbatas. Tidak jarang satu sekolah harus melayani peserta didik dari beberapa desa atau pulau kecil sekaligus. Situasi ini dapat memengaruhi kualitas proses belajar mengajar, karena jumlah guru dan sarana pembelajaran sering kali tidak sebanding dengan kebutuhan peserta didik.

Kondisi geografis kepulauan juga berdampak pada distribusi tenaga pendidik. Banyak guru yang lebih memilih bertugas di wilayah perkotaan atau daerah yang mudah dijangkau. Sementara itu, sekolah-sekolah di daerah terpencil sering mengalami kekurangan guru, terutama untuk mata pelajaran tertentu. Faktor jarak, keterbatasan fasilitas, serta kondisi transportasi menjadi alasan utama mengapa pemerataan tenaga pendidik masih menjadi tantangan besar dalam sistem pendidikan Indonesia. Meskipun demikian, perkembangan teknologi dan kebijakan pemerintah mulai memberikan peluang untuk mengatasi sebagian kendala tersebut. Pemanfaatan teknologi informasi, seperti pembelajaran daring dan penggunaan media digital, dapat membantu menjangkau peserta didik di wilayah yang sulit diakses. Selain itu, program pemerataan guru, pembangunan sekolah di daerah terpencil, dan peningkatan

sarana transportasi pendidikan juga terus diupayakan untuk memperkecil kesenjangan pendidikan antar wilayah.

Dengan demikian, kondisi geografis kepulauan merupakan faktor penting yang memengaruhi perkembangan pendidikan di Indonesia. Tantangan yang muncul akibat keterpisahan wilayah harus dihadapi dengan kebijakan yang tepat, inovasi teknologi, serta kerja sama berbagai pihak. Melalui upaya tersebut, diharapkan akses dan kualitas pendidikan dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh masyarakat Indonesia, tanpa terhalang oleh batas-batas geografis.

2. Distribusi pulau dan akses transportasi

Dalam konteks dunia pendidikan, persebaran pulau ini menghadirkan tantangan tersendiri karena tidak semua wilayah memiliki akses yang sama terhadap sarana dan prasarana pendidikan. Perbedaan akses antarwilayah sering kali terlihat jelas antara daerah perkotaan di pulau besar dan daerah terpencil di pulau kecil atau wilayah perbatasan. Sekolah di kota-kota besar umumnya memiliki fasilitas yang lebih lengkap, tenaga pengajar yang memadai, serta akses informasi yang luas. Sebaliknya, sekolah di pulau-pulau kecil atau daerah terpencil sering menghadapi keterbatasan fasilitas, jumlah guru yang minim, serta keterlambatan distribusi bahan ajar. Hal ini menyebabkan kesenjangan kualitas pendidikan antarwilayah.

Akses transportasi menjadi faktor penting yang sangat memengaruhi kelancaran penyelenggaraan pendidikan di wilayah kepulauan (Tengecha et al., 2024). Banyak daerah yang hanya dapat dijangkau melalui transportasi laut atau udara dengan jadwal yang terbatas. Kondisi cuaca yang tidak menentu juga sering menghambat perjalanan, sehingga mobilitas guru, peserta didik, dan distribusi sarana pendidikan menjadi tidak

lancar. Situasi ini membuat kegiatan belajar mengajar terkadang terganggu.

Selain itu, jarak tempuh yang jauh juga menjadi tantangan bagi para peserta didik di wilayah kepulauan. Di beberapa daerah, peserta didik harus menempuh perjalanan panjang menggunakan perahu, berjalan kaki, atau kombinasi keduanya untuk mencapai sekolah. Kondisi tersebut tentu memerlukan usaha dan ketahanan yang lebih besar dibandingkan peserta didik di daerah yang akses transportasinya lebih baik. Hal ini dapat memengaruhi tingkat kehadiran dan semangat belajar peserta didik.

Pemerintah telah berupaya mengatasi berbagai kendala tersebut melalui berbagai program, seperti pembangunan sekolah di daerah terpencil, penyediaan transportasi khusus, serta pengiriman guru melalui program penugasan di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal). Selain itu, perkembangan teknologi informasi juga mulai dimanfaatkan untuk memperluas akses pendidikan melalui pembelajaran jarak jauh. Upaya-upaya ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan pendidikan antarwilayah di Indonesia.

Dengan demikian, distribusi pulau dan keterbatasan akses transportasi merupakan karakteristik geografis Indonesia yang memiliki pengaruh besar terhadap dunia pendidikan. Tantangan tersebut menuntut adanya kebijakan dan inovasi yang mampu menjangkau seluruh wilayah secara merata. Melalui kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait, diharapkan akses pendidikan yang berkualitas dapat dirasakan oleh seluruh anak Indonesia tanpa terkecuali.

3. Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat kepulauan

Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat kepulauan di Indonesia merupakan salah satu aspek penting dalam memahami

karakteristik wilayah kepulauan yang unik dan kompleks (Kusumawati & Widiasih, 2023). Secara geografis, wilayah kepulauan ditandai oleh keterpisahan antar pulau, aksesibilitas yang terbatas, serta ketergantungan yang tinggi terhadap transportasi laut. Kondisi ini membentuk struktur sosial masyarakat yang cenderung homogen dalam lingkup lokal, namun terfragmentasi secara regional. Selain itu, keterbatasan interaksi antardaerah turut memengaruhi dinamika sosial, termasuk dalam hal pertukaran informasi dan inovasi.

Dari segi ekonomi, masyarakat kepulauan pada umumnya bergantung pada sektor primer seperti perikanan, pertanian, dan hasil laut lainnya. Ketergantungan ini sering kali ditambah oleh masih minimnya diversifikasi ekonomi dan keterbatasan akses terhadap pasar yang lebih luas. Biaya distribusi barang dan jasa yang tinggi menyebabkan harga kebutuhan pokok menjadi lebih mahal dibandingkan wilayah daratan utama. Akibatnya, tingkat kesejahteraan masyarakat di banyak wilayah kepulauan relatif lebih rendah, yang pada gilirannya memengaruhi kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan dasar, termasuk pendidikan.

Kondisi sosial ekonomi tersebut berdampak langsung terhadap akses dan kualitas pendidikan di wilayah kepulauan. Keterbatasan infrastruktur, seperti minimnya fasilitas sekolah dan kurangnya tenaga pendidik yang berkualitas, menjadi tantangan utama. Selain itu, jarak tempuh yang jauh dan kondisi geografis yang sulit sering kali menghambat partisipasi peserta didik dalam kegiatan belajar. Dalam beberapa kasus, anak-anak harus menempuh perjalanan berjam-jam melalui laut untuk mencapai sekolah, yang berpotensi menurunkan motivasi dan kehadiran mereka.

Lebih lanjut, faktor ekonomi keluarga juga berperan signifikan dalam menentukan keberlanjutan pendidikan anak (Von-Stumm et al., 2022). Keterbatasan pendapatan mendorong sebagian keluarga untuk memprioritaskan kontribusi anak dalam kegiatan ekonomi rumah tangga dibandingkan pendidikan formal. Hal ini menyebabkan angka putus sekolah relatif tinggi di beberapa wilayah kepulauan. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan orang tua turut memengaruhi persepsi terhadap pentingnya pendidikan, sehingga investasi dalam pendidikan anak belum menjadi prioritas utama.

Dampak lain yang juga tidak kalah penting adalah kesenjangan kualitas pendidikan antara wilayah kepulauan dan wilayah perkotaan. Sekolah-sekolah di daerah kepulauan sering kali mengalami kekurangan sumber daya, baik dalam bentuk fasilitas fisik maupun akses terhadap teknologi pendidikan. Keterbatasan ini menghambat proses pembelajaran dan mengurangi daya saing peserta didik dari wilayah kepulauan. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memperlebar kesenjangan sosial ekonomi antar wilayah, karena pendidikan merupakan salah satu faktor kunci dalam mobilitas sosial. Oleh karena itu, diperlukan adanya intervensi kebijakan yang komprehensif dan berkelanjutan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pemerintah perlu meningkatkan investasi dalam pembangunan infrastruktur pendidikan, termasuk penyediaan transportasi yang memadai dan distribusi tenaga pendidik yang merata. Selain itu, program pemberdayaan ekonomi masyarakat kepulauan harus diperkuat agar mampu meningkatkan kesejahteraan dan mendukung keberlanjutan pendidikan anak. Dengan pendekatan yang terintegrasi, diharapkan kesenjangan pendidikan di wilayah kepulauan dapat diminimalkan, sehingga

tercipta pemerataan kesempatan belajar bagi seluruh masyarakat Indonesia.

4. Dampak geografis terhadap penyelenggaraan pendidikan

Kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan berimplikasi signifikan terhadap penyelenggaraan pendidikan. Wilayah Indonesia dengan karakteristik topografi yang beragam menciptakan tantangan dalam pemerataan akses pendidikan. Wilayah-wilayah terpencil dan terluar sering kali mengalami keterbatasan infrastruktur, seperti transportasi dan jaringan komunikasi. Akibatnya, distribusi sumber daya pendidikan, baik tenaga pendidik maupun fasilitas belajar, menjadi tidak merata. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan kualitas pendidikan antarwilayah yang cukup mencolok.

Selain itu, hambatan geografis turut memengaruhi mobilitas tenaga pendidik. Banyak guru enggan ditempatkan di daerah terpencil karena akses yang sulit, minimnya fasilitas pendukung, dan keterbatasan layanan publik. Hal ini menyebabkan kekurangan tenaga pengajar di wilayah tertentu, sementara di wilayah perkotaan terjadi penumpukan guru. Ketidakseimbangan ini berdampak pada rasio guru dan peserta didik yang tidak proporsional. Pada akhirnya, kualitas proses pembelajaran di daerah terpencil cenderung lebih rendah dibandingkan dengan daerah yang lebih mudah dijangkau.

Dari segi infrastruktur pendidikan, kondisi geografis juga memengaruhi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana sekolah. Biaya pembangunan sekolah di daerah kepulauan cenderung lebih tinggi karena kendala distribusi material dan akses transportasi. Selain itu, kondisi alam seperti gelombang laut, cuaca ekstrem, dan potensi bencana alam turut mempercepat kerusakan fasilitas pendidikan. Hal ini menyebabkan banyak

DAFTAR PUSTAKA

- Avivah, A. R., & Rindaningsih, I. (2024). Strategi Efektif dalam Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Lembaga Pendidikan. *Jurnal Bintang Manajemen*, 2(4), 264–272. <https://doi.org/10.55606/jubima.v2i4.3542>
- Andriyan, A., & Yoenanto, N. H. (2022). Optimalisasi penerapan dan pengelolaan manajemen berbasis sekolah: literatur review. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 10(1), 14–27. <https://doi.org/10.21831/jamp.v10i1.45011>
- Annisak, F., Ardiyani, F., & Sabina, I. (2024). Memahami Pengawasan dan Evaluasi dalam Administrasi Pendidikan. *JISPENDIORA: Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora*, 3(2), 220–226. <https://doi.org/10.56910/jispendiora.v3i2.1552>
- Ansari, N. R., Irawan, & Nurjaman, U. (2025). Relevansi Pengembangan Nilai-nilai Islami dalam Bidang Manajemen Pendidikan. *Al-Marsus : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 3(1), 66–78. <https://doi.org/10.30983/al-marsus.v3i1.9656>
- Ariesta, A., Pratama, A., Ermita, & Wildanah, F. (2025). Sistem Administrasi Keuangan Sekolah Berbasis Digital Untuk Meningkatkan Efektifitas Pendidikan. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Pendidikan*, 2(1), 343–349. <https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jimp/article/view/874>
- Bashri, J., Dz, M. F., Mubarak, I. F., Husaeni, M. F., & Karmila. (2025). Peran Sarana dan Prasarana dalam Menunjang Kualitas Pendidikan. *SERUMPUN: Journal of Education, Politic, and Social Humaniora*, 3(2), 155. <https://doi.org/10.61590/srp.v3i2.195>

- Bhoki, H., & Bawa Toron, V. B. T. (2023). Implementasi Fungsi Pengarahan dan Pengendalian dalam Manajemen Pendidikan di SMP Panggudi Luhur Domenico Savio Semarang. *Gaudium Vestrum: Jurnal Kateketik Pastoral*, 1–11. <https://doi.org/10.61831/gvjkp.v7i1.154>
- Denico, A. (2024). Optimalisasi Administrasi Pendidikan Islam untuk Pengelolaan PIAUD yang Berkualitas. *Jurnal Adzkiya*, 8(1), 1–85. <https://doi.org/https://doi.org/10.57171/s1byq546>
- Dianis Svari, N. M. F. (2023). Optimalisasi Perencanaan Administratif dalam Administrasi Pendidikan untuk Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan di Indonesia. *Metta : Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 3(4), 464–478. <https://doi.org/10.37329/metta.v3i4.2877>
- Dirahman, F., Setiawan, F., & Iskandar, U. A. (2023). Peran Kepala Sekolah dalam Mengoptimalkan Tenaga Kependidikan. *Al-DYAS*, 2(1), 53–66. <https://doi.org/10.58578/aldyas.v2i1.845>
- Efendi, N., & Sholeh, M. I. (2023). Manajemen Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran. *Academicus: Journal of Teaching and Learning*, 2(2), 68–85. <https://doi.org/10.59373/academicus.v2i2.25>
- Fathimah, M., Hasanah, A., & Azkiyah, A. (2024). Konsep Administrasi Pendidikan. *TSAQOFAH*, 4(6), 3865–3881. <https://doi.org/10.58578/tsaqofah.v4i6.3870>
- Fatimah, M., & Ilyas, M. (2024). Administrasi Guru Dan Kegiatan Belajar Mengajar. *Al-Abshor: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(2), 61–69. <https://doi.org/10.71242/7ec7bf47>
- Fawwaz, A., & Susanty, S. (2024). Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan menuju Sekolah Bermutu. *Jurnal Terapung: Ilmu-Ilmu Sosial*, 6(2), 221. <https://doi.org/10.31602/jt.v6i2.16291>

- Francisco, K. A., & Tanaka, M. (2019). Does public infrastructure affect human capital? The effect of improved transport connectivity on children's education in the Philippines. *Economics of Education Review*, 73, 101927. <https://doi.org/10.1016/j.econedurev.2019.101927>
- Hikmah, N. (2020). Manajemen Sarana dan Prasarana untuk Mengembangkan Mutu Pendidikan. *JAMP: Jurnal Administrasi Dan Manajemen Pendidikan*, 3(2), 123–130. <https://journal-fip.um.ac.id/index.php/jamp/article/view/1741>
- Huda, N. (2022). Sistem Administrasi Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. *AKSI: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(1), 16–31. <https://doi.org/10.37348/aksi.v1i1.197>
- Kabakus, A. K., Bahcekapili, E., & Ayaz, A. (2025). The effect of digital literacy on technology acceptance: An evaluation on administrative staff in higher education. *Journal of Information Science*, 51(4), 930–941. <https://doi.org/10.1177/01655515231160028>
- Khaerul Kholidi, A. (2025). Implementasi Supervisi Pendidikan Untuk Peningkatan Kualitas Pendidik dalam Sistem Pembelajaran di Sekolah. *Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam Dan Isu-Isu Sosial*, 23(1), 57–68. <https://doi.org/10.37216/tadib.v23i1.2240>
- Kusumawati, I., & Widiasih. (2023). Impact Management of Islands in Indonesia by Foreign Parties on The Economic Conditions of Surrounding Communities. *Proceeding of The International Seminar on Business, Economics, Social Science and Technology (ISBEST)*, 3(1). <https://doi.org/10.33830/isbest.v3i1.1413>
- Laana, D. L. (2025). Pendekatan Sistematis dalam Administrasi dan Manajemen Kurikulum untuk Mencapai Pembelajaran Holistik. *Inculco Journal of Christian Education*, 5(1), 47–60. <https://doi.org/10.59404/ijce.v5i1.234>

- Mala, A. R., & Gamar, N. (2025). *Manajemen peserta didik*. PT Nasya Expanding Management (NEM).
- Menteşoğulları, E. (2023). Total Quality Management in Education: A Strategic Approach for Continuous Improvement and Success. *International Journal of Social Sciences*, 7(29), 184–198. <https://doi.org/10.52096/usbd.7.29.10>
- Muharromah, F., & Fatimah, M. (2025). Administrasi Pendidikan: Tinjauan Teoritis tentang Ruang Lingkup dan Perannya dalam Mutu Pembelajaran. *TSAQOFAH*, 6(1), 573–589. <https://doi.org/10.58578/tsaqofah.v6i1.8280>
- Mustofa, W., & Salito. (2025). Peran Stakeholder dalam Pengelolaan Lembaga Pendidikan: Kajian Literatur terhadap Hubungan Sekolah, Orang Tua, Dan Komunitas. *Jurnal Akuntansi, Manajemen, Dan Ilmu Pendidikan (JAMED)*, 1(4), 163–174.
- Nabilla, R. A. P., & Setiawan, R. R. (2025). Penerapan Sistem Informasi Manajemen Surat Sekolah Berbasis Web untuk Meningkatkan Efektivitas Proses Administratif pada SMP 2 Undaan Kudus. *BHAKTI NAGORI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 271–281. https://doi.org/10.36378/bhakti_nagori.v5i1.4406
- Nuryana, M. L., & Nugraha, M. S. (2025). Peran Kepemimpinan Transformatif dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Madrasah. *Jurnal Tahsinia*, 6(1), 150–167. <https://ojs.iairakeyansantang.ac.id/index.php/tahsinia/article/view/588>
- Ristovska, M. (2021). The Right to Education in The 21st Century: Perspectives and Challenges. *Horizons - International Scientific Journal*, 29(2), 203–214. <https://doi.org/10.20544/HORIZONS.A.29.2.21.P17>
- Sabil, H. (2022). Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Di SMPN 11 Kota Jambi. *Jurnal Sains Dan Matematika*, 3(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.1234/sainmatika.v8i1.2220>

- Shalwa Azzahra. (2024). Optimalisasi Pengelolaan Sarana dan Prasarana dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Siswa. *Al-Faizi: Jurnal Politik, Hukum Dan Bisnis*, 2(2), 152–165. <https://doi.org/10.66886/alfaizi-jphb.v2i2.127>
- Shobri, M. (2024). Peran Sistem Informasi Manajemen Pendidikan dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas di Lembaga Pendidikan Islam. *AKSI: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2(2), 78–88. <https://doi.org/10.37348/aksi.v2i2.302>
- Simanjuntak, R., Bangun, H. X., & Turnip, H. (2024). Administrasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan. *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora*, 3(1), 248–258. <https://publisherqu.com/index.php/pediaqu/article/view/826>
- Singh, K. (2010). Right to Basic Education and State Responsibility. *International Journal of Educational Reform*, 19(2), 86–106. <https://doi.org/10.1177/105678791001900202>
- Suchyadi, Y., Indriyani, S. R., & Destiana, D. (2023). Basic Concepts of Educational Supervision Along with Related Administrative Studies. *JHSS (Journal of Humanities and Social Studies)*, 6(3), 406–410. <https://doi.org/10.33751/jhss.v6i3.7506>
- Sulani, Liana, R., & Asiyah, A. (2022). Proses Administrasi Tenaga Kependidikan sebagai Sumber Daya Manusia Pendidikan Islam. *At-Ta'lim: Media Informasi Pendidikan Islam*, 21(1), 34. <https://doi.org/10.29300/attalim.v21i1.4675>
- Tengecha, N. A., Akintunde, T. Y., Agyeman, S., & Alimo, P. K. (2024). Education for sustainable development in rural communities: Parents' perceptions of children's willingness-to-study and learning difficulties associated with school transport in Ukerewe Island, Tanzania. *Sustainable Development*, 32(1), 275–286. <https://doi.org/10.1002/sd.2640>

- Von-Stumm, S., Cave, S. N., & Wakeling, P. (2022). Persistent association between family socioeconomic status and primary school performance in Britain over 95 years. *Npj Science of Learning*, 7(1), 4. <https://doi.org/10.1038/s41539-022-00120-3>
- Wahib, Abd. (2021). Manajemen Evaluasi Program Supervisi Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. *Auladuna : Jurnal Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah*, 3(1), 91–104. <https://doi.org/10.36835/au.v3i1.512>

PROFIL PENULIS



Arsyil Waritsman, S.Pd., M.Pd

lahir di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Penulis menyelesaikan studi Sarjana (S1) di Program Studi Pendidikan Matematika, Universitas Tadulako Palu, pada Tahun 2009. Setelah lulus, penulis mengawali karier sebagai guru Matematika di SMA Negeri 1 Tolitoli pada Tahun 2010-2014. Pada Tahun 2015, Penulis melanjutkan pendidikan Magister (S2) pada Program Studi Pendidikan Matematika, Universitas Negeri Yogyakarta, dan berhasil menyelesaikannya pada Tahun 2017. Perjalanan akademiknya berlanjut dengan bergabung menjadi Dosen di Universitas Madako Tolitoli hingga Tahun 2020. Selama menjadi dosen, Penulis telah memperoleh sertifikat pendidik sebagai Dosen Profesional di bidang Matematika dan juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Madako Tolitoli. Saat ini, Penulis berkarir sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan jabatan fungsional Widyaiswara pada Balai Diklat Keagamaan Ambon, Kementerian Agama RI. Selain itu, penulis juga aktif sebagai *Editor-in-Chief* pada salah satu Jurnal Nasional Terakreditasi. Selain aktif mengajar, Penulis juga aktif dalam menghasilkan berbagai karya ilmiah berupa artikel jurnal nasional dan internasional, prosiding, dan buku terkait pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia. Pada September 2025, penulis kembali melanjutkan pendidikan ke jenjang doktoral (S3) di Program Studi Administrasi Pendidikan, Universitas Pattimura.



Dr. Uswatun Khasanah M.Pd.I., CPHCEP

lahir di Sukoharjo, pada 07 April 1988, Pendidikan terakhir Penulis adalah Doktor Manajemen Pendidikan Islam (MPI) di Pascasarjana UIN Raden Mas Said Surakarta 2022. Penulis menjadi Dosen pada tahun 2017. Memulai karir di STAI Muhammadiyah Klaten 2017-2020 dengan pengalaman struktural sebagai Kepala LPM. Lanjut pada tahun 2021-2022 berkarir di Institut Islam Mamba'ul 'Ulum (IIM) Surakarta. Pengalaman Struktural Pernah menjadi Kepala LPM, Tim Audit Mutu Internal (AMI), Kaprodi S2 PAI, Direktur Pascasarjana di Institut Islam Mamba'ul 'Ulum (IIM) Surakarta. Saat ini penulis bekerja sebagai Dosen di Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman (UNDARIS) Kab. Semarang, saat ini menjabat sebagai Kaprodi S2 Pendidikan Agama Islam masa bakti 2024-2028. Selain itu penulis merupakan Owner and Founder Penerbit Tahta Media Group. Untuk melengkapi pengalamannya Penulis merupakan Reviewer dan Editor di beberapa Journal, Fasilitator Penulisan Buku Perguruan Tinggi (Buku Ajar, Monograf dan Refrensi). Penulis juga aktif di Asosiasi Dosen PTKIS Indonesia (ADPETIKISINDO) selaku Wakil V (MURII dan Duta Dosen) LNI (Lacuna+Novelty+Inovasi+Publikasi) Periode 2024-2029. Buku dan Artikel yang pernah ditulis dan dipublikasikan bisa dilihat melalui link dibawah:

<https://scholar.google.com/citations?user=UAlcP6wAAAAJ&hl=id>,

ID Sinta Penulis

<https://sinta.kemdiktisaintek.go.id/authors/profile/6875840>

Penulis dapat dihubungi melalui Email:

uswatunkhasanah6815@gmail.com



SEKOLAH DI UJUNG NUSANTARA:

STRATEGI ADMINISTRASI PENDIDIKAN DI WILAYAH KEPULAUAN

Buku berjudul “Sekolah di Ujung Nusantara: Strategi Administrasi Pendidikan di Wilayah Kepulauan” menghadirkan kajian komprehensif mengenai pengelolaan pendidikan pada wilayah kepulauan yang memiliki karakteristik geografis, sosial, ekonomi, dan budaya yang berbeda dengan daerah daratan. Buku ini mengangkat berbagai realitas yang dihadapi sekolah-sekolah di wilayah kepulauan, mulai dari keterbatasan sarana dan prasarana, distribusi tenaga pendidik, akses transportasi, hingga tantangan pemerataan mutu pendidikan. Melalui pembahasan yang sistematis, pembaca diajak memahami kondisi nyata pendidikan di wilayah kepulauan sebagai dasar dalam merancang tata kelola sekolah yang efektif dan berkelanjutan. Selanjutnya, buku ini menguraikan konsep dan prinsip administrasi pendidikan yang relevan untuk diterapkan di daerah kepulauan. Pembahasan difokuskan pada fungsi-fungsi administrasi pendidikan, manajemen sumber daya sekolah, kepemimpinan kepala sekolah, pengelolaan peserta didik, serta penguatan kemitraan dengan masyarakat dan pemerintah daerah. Berbagai strategi administrasi pendidikan yang adaptif terhadap kondisi kepulauan juga disajikan secara praktis, termasuk pemanfaatan teknologi, pengelolaan sumber daya yang terbatas, penguatan budaya sekolah, serta inovasi layanan pendidikan yang mampu menjawab kebutuhan lokal. Bagian akhir buku ini menawarkan berbagai rekomendasi kebijakan untuk memperkuat penyelenggaraan pendidikan di wilayah kepulauan. Rekomendasi tersebut mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan sistem pendanaan, pemerataan akses layanan pendidikan, serta pengembangan kebijakan berbasis karakteristik daerah. Dengan pendekatan yang memadukan landasan teoritis dan realitas lapangan, buku ini menjadi referensi penting bagi akademisi, mahasiswa, peneliti, kepala sekolah, guru, pengelola pendidikan, serta pembuat kebijakan yang memiliki perhatian terhadap pengembangan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan di seluruh wilayah Nusantara.



CV. Tahta Media Group

Sukoharjo, Jawa Tengah
Web : www.tahtamedia.co.id
Ig : tahtamedia group
Telp/WA : +62 896 5427 3996

